

ABSTRAK

Nurul Aini Azra Sidadolog (2025) “Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Oleh Kepala Desa Pada Program Prioritas Dana Desa Berdasarkan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Di Desa Cileunyi Wetan”

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan program prioritas yang bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan hidup. Namun, realita di Desa Cileunyi Wetan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Sebagian besar penerima BLT masih bergantung pada bantuan dan belum mampu keluar dari kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta bentuk-bentuk produktivitas BLT bagi masyarakat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dan peran kepala desa Cileunyi Wetan dalam mengubah BLT menjadi bantuan produktif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan perspektif tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan dan penyaluran BLT di Desa Cileunyi Wetan berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam penelitian ini, digunakan teori kebijakan yang merupakan tindakan oleh aktor, yaitu pejabat atau lembaga pemerintah, dalam bidang kegiatan tertentu dengan pengaruh atau dampak yang baik terhadap masyarakat. Teori kebijakan akan menjadi panduan untuk meneliti peran kepala desa dalam meningkatkan mutu penyaluran BLT dalam wujud produktif serta mencakup pendekatan siyasah dusturiyah sebagai landasan konseptual untuk menilai bagaimana prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam tata kelola BLT.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi terkait, observasi, serta wawancara mendalam dengan aparatur desa yang terlibat dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Cileunyi Wetan sudah sesuai aturan, namun belum ada upaya mengubahnya dari bantuan konsumtif ke produktif. Kepala Desa dan jajarannya belum memiliki langkah lanjutan untuk mengembangkan program produktif dari dana BLT karena sebagian besar penerima BLT dinilai layak sebagai KPM berdasarkan kondisi mereka yang tidak memungkinkan lagi bekerja atau berusaha secara mandiri. Meski belum produktif secara struktural, prioritas bantuan bagi warga rentan mencerminkan keadilan menurut siyasah dusturiyah. Namun, kebijakan jangka panjang untuk pemberdayaan ekonomi masih perlu disiapkan.